

Dinamika ketaatan kepada ulil amri: Studi tafsir tematik dan implikasinya bagi kehidupan bernegara di Indonesia

Atu Siti Nurkholilah

Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: sitinurkholilah834@gmail.com

Kata Kunci:

Ulil amri, tafsir tematik, ketaatan, kritik pemerintah, kehidupan bernegara

Keyword:

Ulil amri, thematic tafsir, obedience, government criticism, state life.

ABSTRAK

Artikel ini membahas dinamika ketaatan kepada ulil amri dalam perspektif Al-Qur'an dengan pendekatan tafsir tematik serta implikasinya bagi kehidupan bernegara di Indonesia. Fokus kajian diarahkan pada penafsiran QS. An-Nisa ayat 58–59 yang menjadi dasar konsep kepemimpinan, ketaatan, dan keadilan dalam Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*), dengan sumber data primer berupa Al-Qur'an dan sumber data sekunder berupa kitab-kitab tafsir serta artikel jurnal yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa ketaatan kepada ulil

amri dalam Islam bersifat kondisional dan tidak mutlak, yaitu bergantung pada kesesuaian kebijakan pemimpin dengan nilai-nilai keadilan dan ajaran Allah serta Rasul. Selain itu, kritik terhadap pemerintah dipahami sebagai bagian dari amar ma'ruf nahi munkar selama disampaikan secara etis dan konstruktif. Dalam konteks Indonesia, konsep ulil amri relevan dengan sistem demokrasi dan konstitusi, di mana masyarakat berperan sebagai pihak yang taat sekaligus kritis dalam menjaga keadilan dan stabilitas negara.

ABSTRACT

This article examines the dynamics of obedience to *ulil amri* from a Qur'anic perspective using a thematic interpretation approach and analyzes its implications for state life in Indonesia. The study focuses on the interpretation of Surah An-Nisa verses 58–59, which serve as the foundation for leadership, obedience, and justice in Islam. This research employs a qualitative method with a library research approach, using the Qur'an as the primary data source and classical tafsir works as well as relevant journal articles as secondary data. The findings indicate that obedience to *ulil amri* in Islam is conditional rather than absolute, depending on the conformity of leaders' policies with principles of justice and the teachings of Allah and His Messenger. Furthermore, criticism of the government is understood as part of *amar ma'ruf nahi munkar* as long as it is conveyed ethically and constructively. In the Indonesian context, the concept of *ulil amri* is compatible with the democratic system and constitutional framework, positioning society as both obedient and critical participants in maintaining justice and national stability.

Pendahuluan

Konsep ulil amri merupakan bagian penting dalam ajaran Al-Qur'an yang berkaitan dengan kepemimpinan dan ketaatan dalam kehidupan sosial. Al-Qur'an secara eksplisit menyebutkan perintah taat kepada Allah, Rasul, dan ulil amri dalam QS. An-Nisa ayat 59, serta menekankan prinsip amanah dan keadilan dalam kepemimpinan pada QS. An-Nisa ayat 58. Ayat-ayat ini menjadi dasar normatif bagi hubungan antara



pemimpin dan rakyat dalam Islam, baik dalam konteks keagamaan maupun kenegaraan (Zahra dkk., 2022). Dalam kehidupan bernegara di Indonesia, konsep ketaatan kepada pemimpin menghadapi dinamika yang kompleks. Di satu sisi, ketaatan dipahami sebagai kewajiban warga negara untuk menjaga stabilitas dan ketertiban. Namun, di sisi lain, kebebasan menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah juga dijamin dalam sistem demokrasi. Kondisi ini sering menimbulkan perdebatan, terutama ketika kritik terhadap pemerintah dianggap sebagai bentuk pembangkangan atau ketidaktaatan kepada ulil amri (Limbong dkk., 2023).

Perbedaan pemahaman masyarakat mengenai makna ketaatan kepada pemimpin turut memperkuat polemik tersebut. Sebagian memahami ketaatan sebagai sikap mutlak tanpa syarat, sementara yang lain memandang ketaatan bersifat kondisional dan harus selaras dengan nilai keadilan serta kemaslahatan umat. Perbedaan ini juga terlihat dalam penafsiran para mufasir terhadap QS. An-Nisa ayat 59, baik dalam tafsir klasik maupun kontemporer, seperti Tafsir Ibnu Katsir, Al-Kasysyaf, Al-Manar, dan Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka (Iskandar dkk., 2024). Oleh karena itu, pendekatan tafsir tematik (*maudhu'i*) menjadi penting untuk memahami ayat-ayat tentang ketaatan kepada ulil amri secara menyeluruh dan kontekstual. Pendekatan ini tidak hanya menghimpun ayat-ayat terkait dalam Al-Qur'an, tetapi juga menganalisisnya dengan mempertimbangkan konteks sosial dan realitas kehidupan bernegara. Tafsir tematik memungkinkan penafsiran yang lebih komprehensif terhadap isu-isu kepemimpinan dan ketaatan, sehingga ajaran Al-Qur'an dapat diaplikasikan secara relevan dalam konteks kekinian (Fattah, 2020).

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengkaji dinamika ketaatan kepada ulil amri melalui pendekatan tafsir tematik serta menganalisis implikasinya bagi kehidupan bernegara di Indonesia. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih proporsional mengenai relasi antara ketaatan, kritik terhadap pemerintah, dan nilai-nilai Islam dalam kerangka negara demokratis.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena objek kajian penelitian berupa teks-teks keagamaan, khususnya Al-Qur'an dan karya-karya tafsir, serta artikel ilmiah yang membahas konsep ulil amri, kepemimpinan, dan ketaatan dalam perspektif Islam. Penelitian kepustakaan memungkinkan peneliti untuk mengkaji secara mendalam pemikiran para mufasir dan akademisi terkait tema yang diteliti melalui sumber-sumber tertulis yang relevan (Pramitha, 2017).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah tafsir tematik (*maudhu'i*). Tafsir tematik merupakan metode penafsiran Al-Qur'an dengan cara menghimpun ayat-ayat yang memiliki keterkaitan dengan satu tema tertentu, kemudian dianalisis secara komprehensif untuk memperoleh pemahaman yang utuh dan sistematis. Pendekatan ini dipandang relevan untuk mengkaji konsep ketaatan kepada ulil amri karena tema tersebut tidak hanya terbatas pada satu ayat, tetapi

berkaitan dengan prinsip kepemimpinan, keadilan, dan tanggung jawab sosial yang tersebar dalam Al-Qur'an (Fattah, 2020).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer berupa Al-Qur'an, dengan fokus utama pada QS. An-Nisa ayat 58–59 yang secara eksplisit membahas prinsip amanah, keadilan, dan ketaatan kepada pemimpin. Sementara itu, data sekunder meliputi kitab-kitab tafsir dan jurnal ilmiah yang relevan, seperti Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka, Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir Al-Kasysyaf karya Al-Zamakhsyari, Tafsir Al-Manar, serta artikel-artikel ilmiah yang membahas konsep ulil amri dan kepemimpinan dalam Islam (Limbong et al., 2023).

Teknik analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan tema ketaatan kepada ulil amri. Kedua, menganalisis penafsiran para mufasir terhadap ayat-ayat tersebut dengan memperhatikan perbedaan dan persamaan pandangan. Ketiga, menarik implikasi kontekstual dari hasil penafsiran tersebut untuk memahami relevansinya dengan kehidupan bernegara di Indonesia, khususnya dalam relasi antara ketaatan kepada pemerintah dan sikap kritis masyarakat. Melalui tahapan ini, diharapkan diperoleh pemahaman yang komprehensif dan kontekstual mengenai dinamika ketaatan kepada ulil amri dalam perspektif Al-Qur'an.

Pembahasan

Konsep *Ulil Amri* dalam Al-Qur'an

Istilah ulil amri secara bahasa berasal dari dua kata, yaitu *ulū* yang berarti “pemilik” atau “orang-orang yang mempunyai”, dan *al-amr* yang berarti “urusan”, “perintah”, atau “kekuasaan”. Dengan demikian, ulil amri dapat dipahami sebagai pihak-pihak yang memiliki otoritas atau kewenangan dalam mengatur urusan masyarakat. Dalam terminologi Al-Qur'an, istilah ini tidak hanya menunjuk pada penguasa atau pemimpin politik, tetapi juga mencakup pihak-pihak yang memiliki otoritas dalam bidang hukum, pemerintahan, dan kemaslahatan umat (Lubis, 2025).

Konsep ulil amri secara eksplisit disebutkan dalam QS. An-Nisa ayat 59, yang memerintahkan orang-orang beriman untuk taat kepada Allah, Rasul, dan ulil amri. Sementara itu, QS. An-Nisa ayat 58 menegaskan prinsip dasar kepemimpinan berupa amanah dan keadilan. Kedua ayat ini menunjukkan bahwa otoritas ulil amri dalam Islam tidak berdiri sendiri, melainkan terikat oleh nilai-nilai moral dan etika yang bersumber dari ajaran Al-Qur'an. Dengan demikian, kepemimpinan dalam perspektif Al-Qur'an tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga bersifat normatif dan bertanggung jawab (Zahra dkk., 2022).

Hubungan antara ketaatan kepada Allah, Rasul, dan ulil amri dalam QS. An-Nisa ayat 59 menunjukkan adanya hierarki ketaatan. Ketaatan kepada Allah dan Rasul bersifat mutlak, sedangkan ketaatan kepada ulil amri bersifat turunan dan kondisional. Hal ini ditegaskan oleh para mufasir, termasuk Ibnu Katsir, yang menekankan bahwa ketaatan kepada pemimpin hanya berlaku selama perintah tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Allah dan Rasul-Nya (Iskandar dkk., 2024). Dengan demikian, Al-Qur'an memberikan batasan yang jelas bahwa legitimasi ketaatan kepada

pemimpin bergantung pada komitmen mereka terhadap keadilan, amanah, dan nilai-nilai ilahiah. Berdasarkan penafsiran tersebut, konsep ulil amri dalam Al-Qur'an tidak dapat dipahami secara absolut. Ketaatan kepada pemimpin merupakan bagian dari upaya menjaga keteraturan sosial dan kemaslahatan umat, namun tetap harus berada dalam koridor nilai-nilai Al-Qur'an. Pemahaman ini menjadi landasan penting untuk menilai praktik ketaatan dan sikap kritis terhadap pemimpin dalam konteks kehidupan bernegara, khususnya di Indonesia yang menganut sistem demokrasi dan hukum konstitusional.

Dalam kajian Al-Qur'an, konsep ulil amri dipahami sebagai representasi otoritas yang memiliki tanggung jawab moral dan sosial dalam mengatur kehidupan umat. (Al Faruq, dkk, 2024) menjelaskan bahwa keberadaan ulil amri tidak semata-mata dimaknai sebagai simbol kekuasaan formal, melainkan sebagai pihak yang menjalankan fungsi kepemimpinan berdasarkan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan nilai-nilai ketuhanan. Oleh karena itu, legitimasi kepemimpinan dalam Islam tidak hanya ditentukan oleh kedudukan struktural, tetapi juga oleh komitmen pemimpin terhadap nilai-nilai etis dan spiritual yang bersumber dari ajaran agama. Konsep ini menegaskan bahwa otoritas dalam Islam bersifat normatif dan moral, sehingga ketaatan masyarakat terhadap pemimpin idealnya dibangun atas dasar keadilan, tanggung jawab, dan orientasi pada kemaslahatan umat, bukan semata-mata karena kekuasaan formal yang dimilikinya (Al Faruq, 2024).

Sub Ketaatan kepada Ulil Amri dalam Perspektif Tafsir

Dalam Tafsir Ibnu Katsir, ketaatan kepada ulil amri dipahami sebagai kewajiban yang bersifat bersyarat. Ibnu Katsir menegaskan bahwa perintah taat kepada pemimpin dalam QS. An-Nisa ayat 59 harus ditempatkan dalam kerangka ketaatan kepada Allah dan Rasul. Oleh karena itu, ketaatan kepada pemimpin tidak berlaku apabila perintah tersebut bertentangan dengan syariat Islam. Pandangan ini menunjukkan bahwa otoritas pemimpin dalam Islam dibatasi oleh nilai-nilai ilahiah dan prinsip keadilan, sehingga ketaatan tidak dapat dimaknai secara mutlak (Iskandar dkk., 2024). Sementara itu, Tafsir Al-Kasasyaf karya Al-Zamakhsyari menekankan dimensi rasional dan etis dalam memahami konsep ulil amri. Al-Zamakhsyari memandang bahwa pemimpin yang layak ditaati adalah mereka yang menjalankan amanah dan menegakkan keadilan. Dalam penafsirannya terhadap QS. An-Nisa ayat 58–59, ia menekankan pentingnya integritas moral dan tanggung jawab sosial pemimpin. Dengan demikian, ketaatan rakyat berkorelasi langsung dengan kualitas kepemimpinan yang adil dan berorientasi pada kemaslahatan umum (Lubis, 2025).

Pandangan yang lebih kontekstual dapat ditemukan dalam Tafsir Al-Manar karya Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha. Tafsir ini memahami ulil amri tidak hanya sebagai penguasa politik, tetapi juga mencakup lembaga dan otoritas yang berperan dalam pengelolaan urusan publik. Ketaatan kepada ulil amri dalam perspektif Al-Manar dipandang sebagai upaya menjaga keteraturan sosial dan stabilitas masyarakat, selama kepemimpinan tersebut dijalankan secara adil dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Tafsir ini mencerminkan upaya mengaitkan ajaran Al-Qur'an dengan realitas sosial dan sistem pemerintahan modern (Fatih, 2022). Adapun Buya Hamka

dalam Tafsir Al-Azhar menempatkan konsep ketaatan kepada ulil amri dalam bingkai keadilan dan tanggung jawab moral. Menurut Hamka, pemimpin yang adil merupakan prasyarat utama bagi terwujudnya ketaatan rakyat. Ia menegaskan bahwa ketaatan bukanlah bentuk ketundukan buta, melainkan sikap sadar yang didasarkan pada nilai kebenaran dan keadilan. Dalam konteks ini, Hamka juga membuka ruang bagi kritik terhadap pemimpin apabila kebijakan yang diambil menyimpang dari nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan (Limbong dkk., 2023).

Berdasarkan berbagai perspektif tafsir tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketaatan kepada ulil amri dalam Al-Qur'an dipahami secara beragam, namun memiliki titik temu pada prinsip bahwa ketaatan tidak bersifat absolut. Seluruh mufasir menekankan pentingnya keadilan, amanah, dan kesesuaian dengan ajaran Allah dan Rasul sebagai dasar legitimasi ketaatan kepada pemimpin. Pemahaman ini menjadi landasan penting dalam menilai dinamika ketaatan dan sikap kritis terhadap pemerintah dalam kehidupan bernegara.

Dinamika Ketaatan dan Kritik terhadap Pemerintah

Berdasarkan penafsiran terhadap QS. An-Nisa ayat 58–59, ketaatan kepada ulil amri dalam Islam bersifat kondisional dan tidak mutlak. Ketaatan tersebut berlaku selama pemimpin menjalankan amanah, menegakkan keadilan, serta tidak memerintahkan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Allah dan Rasul. Prinsip ini menunjukkan bahwa Islam tidak mengajarkan kepatuhan tanpa batas, melainkan ketaatan yang disertai kesadaran moral dan tanggung jawab etis. Dengan demikian, ketaatan kepada pemerintah harus dipahami dalam kerangka nilai-nilai Qur'ani yang menempatkan keadilan dan kemaslahatan umat sebagai tujuan utama kepemimpinan.

Dalam konteks tersebut, kritik terhadap pemerintah dapat dipahami sebagai bagian dari pelaksanaan amar ma'ruf nahi munkar. Al-Qur'an dan tradisi tafsir menegaskan bahwa umat Islam memiliki kewajiban untuk mengingatkan pemimpin apabila terjadi penyimpangan dari prinsip keadilan dan kebenaran. Kritik yang disampaikan secara etis, argumentatif, dan bertujuan memperbaiki keadaan bukanlah bentuk pembangkangan, melainkan wujud kepedulian terhadap keberlangsungan pemerintahan yang adil. Pendekatan tafsir tematik menunjukkan bahwa perintah ketaatan selalu berjalan seiring dengan tuntutan moral untuk menegakkan kebenaran dalam kehidupan sosial dan politik. Namun demikian, Al-Qur'an juga memberikan batasan yang jelas antara kritik konstruktif dan pembangkangan terhadap pemimpin. Kritik yang berlandaskan pada nilai kebenaran, disampaikan dengan cara yang santun, serta bertujuan menjaga kemaslahatan bersama dapat dibenarkan secara syar'i. Sebaliknya, tindakan yang mengarah pada kekacauan, provokasi, dan kerusakan tatanan sosial tidak sejalan dengan prinsip ketaatan dan stabilitas yang ditekankan dalam ajaran Islam. Oleh karena itu, sikap kritis harus dibingkai dalam etika keislaman dan kepentingan umum, bukan didorong oleh kepentingan pribadi atau kelompok semata.

Melalui pendekatan tafsir tematik dan kajian kepemimpinan Qur'ani, dapat dipahami bahwa Islam menawarkan keseimbangan antara ketaatan dan kritik. Ketaatan diperlukan untuk menjaga ketertiban dan persatuan, sementara kritik

berfungsi sebagai mekanisme kontrol moral terhadap kekuasaan. Dalam konteks kehidupan bernegara di Indonesia, pemahaman ini menjadi relevan untuk membangun hubungan yang sehat antara pemerintah dan masyarakat, sehingga tercipta pemerintahan yang adil, responsif, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama. Dalam kerangka pemikiran Islam, ketaatan kepada pemimpin tidak dipahami sebagai kepatuhan yang bersifat mutlak, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab moral yang dibatasi oleh nilai-nilai keadilan dan amanah. Kepemimpinan diposisikan sebagai amanah yang harus dijalankan sesuai prinsip kemaslahatan umat, sehingga ketika terjadi penyimpangan dari nilai tersebut, umat memiliki ruang etis untuk melakukan koreksi secara konstruktif. Hal ini menunjukkan bahwa kritik terhadap pemerintah bukanlah bentuk pembangkangan, melainkan bagian dari mekanisme kontrol moral dalam Islam guna menjaga keseimbangan antara otoritas dan keadilan (Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, S.Ag., 2020).

Implikasi Konsep *Ulil Amri* bagi Kehidupan Bernegara di Indonesia

Konsep *ulil amri* dalam Al-Qur'an memiliki relevansi yang kuat dengan sistem demokrasi dan konstitusi yang berlaku di Indonesia. Dalam sistem kenegaraan Indonesia, kekuasaan dijalankan berdasarkan hukum dan konstitusi, bukan kekuasaan absolut. Pemimpin dipilih melalui mekanisme demokratis dan memiliki tanggung jawab untuk menegakkan keadilan serta melayani kepentingan rakyat. Prinsip ini sejalan dengan ajaran Al-Qur'an dalam QS. An-Nisa ayat 58–59 yang menekankan amanah dan keadilan sebagai fondasi kepemimpinan. Oleh karena itu, *ulil amri* dalam konteks Indonesia dapat dipahami sebagai pemerintah dan lembaga negara yang sah secara hukum dan konstitusional.

Dalam perspektif Islam, etika ketaatan dan kritik terhadap pemerintah harus ditempatkan secara seimbang. Ketaatan kepada pemimpin bertujuan menjaga ketertiban, persatuan, dan stabilitas negara. Namun, ketaatan tersebut tidak bersifat mutlak, melainkan terikat pada prinsip kebenaran dan keadilan. Ketika kebijakan pemerintah menyimpang dari nilai-nilai keadilan, Islam memberikan ruang bagi kritik sebagai bagian dari amar ma'ruf nahi munkar. Kritik yang etis, santun, dan bertanggung jawab tidak bertentangan dengan ajaran Islam, bahkan menjadi sarana kontrol moral terhadap kekuasaan agar tetap berjalan sesuai dengan tujuan kemaslahatan bersama. Lebih jauh, masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga keadilan dan stabilitas negara. Dalam perspektif *ulil amri*, masyarakat tidak hanya berposisi sebagai pihak yang taat, tetapi juga sebagai mitra kritis pemerintah. Partisipasi aktif masyarakat melalui mekanisme demokrasi, pengawasan kebijakan publik, serta penyampaian aspirasi secara konstitusional merupakan bentuk tanggung jawab sosial yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Dengan demikian, pemahaman yang tepat terhadap konsep *ulil amri* dapat mendorong terciptanya hubungan yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus memperkuat kehidupan bernegara yang adil, stabil, dan bermartabat di Indonesia.

Dinamika ketaatan kepada *Ulil Amri* dalam perspektif Islam merupakan ketaatan yang bersifat dependen dan bersyarat pada kepatuhan pemimpin tersebut kepada Allah dan Rasul-Nya. Hal ini terlihat dari redaksi QS. An-Nisa: 59, di mana perintah taat

(*athi'u*) diulang untuk Allah dan Rasul, namun tidak diulang untuk Ulil Amri, yang menandakan bahwa ketaatan kepada pemegang kekuasaan tidak boleh bertentangan dengan prinsip dasar syariat. Sebagai pemegang urusan umat, Ulil Amri memiliki wewenang untuk mengatur dan mengendalikan keadaan demi mewujudkan keadilan sosial (Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, S.Ag., 2020). Dalam konteks bernegara di Indonesia, ketaatan ini diwujudkan melalui kepatuhan warga negara terhadap regulasi yang sah, seperti sistem perpajakan, yang dipandang sebagai manifestasi dari kesadaran religius untuk mendukung kemaslahatan umum dan keadilan (Galuh kartiko, 2021). Kepemimpinan Islami yang ideal mengedepankan prinsip pelayanan (*servant leadership*), bersikap lemah lembut, komunikatif, serta senantiasa melibatkan partisipasi publik melalui musyawarah.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa konsep ulil amri dalam Al-Qur'an, khususnya QS. An-Nisa ayat 58–59, menegaskan pentingnya ketaatan kepada pemimpin yang dijalankan dalam kerangka amanah dan keadilan. Ketaatan kepada ulil amri tidak bersifat mutlak, melainkan bersyarat pada kesesuaian kebijakan dan perintah pemimpin dengan nilai-nilai ajaran Allah dan Rasul. Dengan demikian, legitimasi kepemimpinan dalam Islam sangat bergantung pada komitmen pemimpin terhadap prinsip keadilan, tanggung jawab, dan kemaslahatan umat.

Melalui pendekatan tafsir tematik, ditemukan bahwa para mufasir memiliki kesamaan pandangan dalam menempatkan ketaatan sebagai instrumen menjaga ketertiban sosial, sekaligus membuka ruang bagi sikap kritis terhadap pemimpin. Kritik terhadap pemerintah dipahami sebagai bagian dari amar ma'ruf nahi munkar selama disampaikan secara etis, konstruktif, dan bertujuan memperbaiki keadaan, bukan sebagai bentuk pembangkangan atau upaya merusak stabilitas negara.

Dalam konteks kehidupan bernegara di Indonesia, konsep ulil amri memiliki relevansi yang kuat dengan sistem demokrasi dan konstitusi. Pemerintah sebagai ulil amri memiliki kewajiban menegakkan keadilan dan melayani kepentingan rakyat, sementara masyarakat berperan sebagai pihak yang taat sekaligus kritis. Pemahaman yang seimbang antara ketaatan dan kritik ini diharapkan dapat memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat, serta mendorong terwujudnya kehidupan bernegara yang adil, stabil, dan berlandaskan nilai-nilai keislaman.

Daftar Pustaka

- Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, S.Ag., M. S. (2020). *kepemimpinan dalam perspektif islam*. 10–12. <https://repository.uin-malang.ac.id/7997/1/7997.pdf>
- Faruq, Umar Al, Intania Rafi'ah Ramadhani, Fergyazicco Achmed Fahrozi, N. H. (2024). Menelusuri Asbabun Nuzul Dalam Kepemimpinan Islam. *Jurnal Kajian Agama Dan Multikulturalisme Indonesia*, 3(2), 15. <https://repository.uinmalang.ac.id/19690/1/19690.pdf>
- Fatih, M. A. (2022). *Manajemen Kepemimpinan dalam Perspektif Tafsir Al-Manar*. 4(2), 47–67. <https://repository.uin-malang.ac.id/12796/2/12796.pdf>

- Fattah, A. (2020). Tafsir Tematik Islam Moderat Perspektif Al-Quran. *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 5(2), 156–172. <https://doi.org/10.24090/maghza.v5i2.3125>
- Galuh kartiko. (2021). VOLUNTARY COMPLIANCE DENGAN KONSEP KEADILAN PAJAK PERSPEKTIF IBNU KHALDUN BAGI WAJIB PAJAK Sri Andriani Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang , Abstrak PENDAHULUAN Maikel (2017) menjelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (. 12(1), 1–18.
- Iskandar, N., Wulandari, B., & Yunita, A. (2024). Metode Tahlili Tafsir Ibnu Katsir dalam Surat An-Nisa Ayat 59 dan Implikasinya Terhadap Konsep Kepemimpinan dalam Islam tinjauan dan sudut pandang menafsir akan menuntun kepada kualitas tafsir apakah ia memiliki berkaitan . Sebagai contoh , seorang mufasi. 3, 8–23.
- Limbong, R. I., Chandra, A. F., Hakim, L., & Ghazali, M. bin. (2023). a Fair Leader Perspective Buya Hamka (Review of the Word 'Ulil Amri in Surah an Nisa: 59). *QIST: Journal of Quran and Tafseer Studies*, 2(2), 220–237. <https://doi.org/10.23917/qist.v2i2.1308>
- Lubis, M. H. A. (2025). Konsep Kepemimpinan dalam Surah An-Nisa Ayat 58-59 Pada Tafsir Al Kasysyaf Karya Al-Zamakhsyari. *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)*, 3(1), 177–186.
- Pramitha, D. (2017). KAJIAN TEMATIS AL-QUR'AN DAN HADITS TENTANG KEPEMIMPINAN. *J-Pai*, 3(1). <https://doi.org/10.18860/j-pai.v3i1.3989>
- Zahra, I. A., Marno, M., & Wibawa, B. (2022). Kewajiban Pemimpin Dan Rakyat Dalam Perspektif Al-Qur'an Surah an-Nisa Ayat 58-59. *Journal of Islamic Education Studies*, 1(1), 10–16. <https://doi.org/10.58569/jies.v1i1.431>